

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BURU

(Implementation of Forest Management Unit Policy Based on Community Participation in Buru Regency)

Jofer Tahapary¹, Bokiraiya Latuamury², & Iskar¹

¹Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, 97233, Indonesia

² Program Studi Ilmu Lingkungan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, 97233, Indonesia

*Email korespondensi: jofer.tahapary@gmail.com

Abstract

Forest Management Units (FMUs) are intended to strengthen forest governance at the site level, yet their implementation depends on institutional capacity and community engagement. This study examines FMU policy implementation and community participation in KPHP Model Unit II Wae Apu, Buru Regency, Maluku, Indonesia. A descriptive qualitative approach combined in-depth interviews and questionnaires with a review of policy documents, institutional reports and regional planning documents. Data were analysed through iterative reduction, display and verification. The findings indicate progress in institutional establishment, forest management planning and initial forest resource utilisation. However, implementation remained constrained by limited personnel, inadequate technical infrastructure, weak inter-agency coordination and insufficient integration of stakeholder interests. Community participation was uneven and associated with economic incentives, trust and local sociocultural conditions. Communication, institutional capacity, resource availability and governance arrangements also emerged as important implementation factors. The study highlights a gap between formal policy provisions and operational practice. Strengthening participatory governance, institutional capacity and coordination is therefore important for more effective and sustainable forest management in Buru Regency.

Keywords: Forest Governance; Policy Implementation; Community Participation; Institutional Capacity; Participatory Forest Management

Abstrak

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk untuk memperkuat tata kelola hutan di tingkat tapak, tetapi implementasinya bergantung pada kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan KPH dan partisipasi masyarakat pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, Maluku. Penelitian menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, kuesioner, serta telaah dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan pada pembentukan kelembagaan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan tahap awal pemanfaatan sumber daya hutan. Namun, implementasi masih terkendala keterbatasan personel, sarana teknis yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya integrasi kepentingan pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat belum merata dan berkaitan dengan insentif ekonomi, kepercayaan, serta kondisi sosial budaya setempat. Komunikasi, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan pengaturan tata kelola juga teridentifikasi sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan antara ketentuan kebijakan dan pelaksanaan operasional. Penguatan tata kelola partisipatif, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Buru.

Kata Kunci: Tata Kelola Hutan; Implementasi Kebijakan; Partisipasi Masyarakat; Kapasitas Kelembagaan; Pengelolaan Hutan Partisipatif

I. Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya hutan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekologis, tetapi juga dengan efektivitas kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan pengelolaan yang terfragmentasi dan lemahnya koordinasi antaraktor dapat menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat tapak. Oleh karena itu, penguatan tata kelola hutan memerlukan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekologis wilayah pengelolaan. Pendekatan tersebut penting untuk mengintegrasikan kepentingan perlindungan ekosistem, pemanfaatan sumber daya hutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan [1], [2].

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dikembangkan sebagai unit pengelolaan di tingkat tapak untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan kehutanan melalui perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan sumber daya hutan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan [3], [4]. Pengembangan KPH memiliki landasan dalam kebijakan kehutanan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Secara kelembagaan, keberadaan KPH diharapkan dapat memperkuat kepastian wilayah pengelolaan, meningkatkan koordinasi antaraktor, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya hutan. Namun, pelaksanaan kebijakan KPH tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran dan infrastruktur, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan untuk menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif [5], [6] [1]

Kajian mengenai implementasi kebijakan KPH telah memberikan pemahaman tentang pentingnya kapasitas organisasi, dukungan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Meskipun demikian, hubungan antara dimensi kelembagaan dan partisipasi masyarakat masih perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis, aksesibilitas, dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang beragam. Perbedaan kondisi sosial-ekologis tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan

kebijakan, distribusi manfaat pengelolaan hutan, serta hubungan antara institusi pengelola dan masyarakat setempat. Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang menjadi perhatian dalam kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan KPH pada konteks pengelolaan hutan di Pulau Buru (Andayani, 2021; Taati, 2015).

Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, merupakan wilayah yang memiliki sumber daya hutan dengan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, KPHP Model Unit II Wae Apu memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, termasuk perencanaan pengelolaan, perlindungan kawasan, dan pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan dukungan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat. Namun, sebagaimana menjadi fokus penelitian ini, implementasi kebijakan KPH masih menghadapi persoalan operasional yang berkaitan dengan keterbatasan personel dan sarana pendukung, koordinasi kelembagaan, serta belum meratanya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian yang tidak hanya mengidentifikasi capaian pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang berkaitan dengan kesenjangan antara ketentuan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan [7], [8] .

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KPH pada KPHP Model Unit II Wae Apu di Kabupaten Buru, mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan dan operasional yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara kapasitas kelembagaan, koordinasi tata kelola, dan partisipasi masyarakat dalam konteks implementasi kebijakan kehutanan di wilayah kepulauan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan kapasitas KPH, peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendukung perumusan strategi pengelolaan hutan yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-ekologis Kabupaten Buru.

II. Metode Penelitian

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada September–Desember 2025 di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan peran KPHP Model Unit II Wae Apu sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak serta relevansinya dengan implementasi kebijakan kehutanan dan partisipasi masyarakat. Wilayah pengelolaan mencakup kawasan dengan fungsi hutan lindung dan hutan produksi yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekologis yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.

Pemilihan lokasi juga didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji keterkaitan antara kapasitas kelembagaan, pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Unit analisis penelitian mencakup implementasi kebijakan pada tingkat organisasi pengelola KPH dan keterlibatan masyarakat di dalam maupun sekitar wilayah kelolanya. Informasi mengenai luas wilayah, fungsi kawasan, dan batas administratif merujuk pada dokumen resmi KPHP Model Unit II Wae Apu yang relevan dengan konteks penelitian.

2.2 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuesioner untuk menganalisis implementasi kebijakan KPH dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan, interaksi antarpemangku kepentingan, kendala kelembagaan, serta pengalaman masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Data kualitatif menjadi dasar utama interpretasi, sedangkan hasil kuesioner digunakan sebagai informasi pendukung untuk menggambarkan kecenderungan penilaian responden terhadap indikator penelitian.

Analisis implementasi kebijakan mengacu pada kerangka Edward III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Partisipasi masyarakat dianalisis sebagai aspek tambahan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengambilan keputusan pengelolaan hutan. Kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kelembagaan dan bentuk keterlibatan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan KPH di tingkat tapak.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, kuesioner terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Data primer diperoleh dari pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan KPH, terutama unsur pengelola KPH dan masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar wilayah pengelolaan. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan sumber daya hutan.

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, koordinasi kelembagaan, serta bentuk dan hambatan partisipasi masyarakat. Kuesioner terstruktur digunakan untuk memperoleh penilaian responden terhadap indikator implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan aspek pengelolaan hutan yang dikaji. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan hutan, aktivitas masyarakat, serta kondisi operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan kehutanan, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), laporan kelembagaan, dokumen perencanaan daerah, dan literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memahami konteks kelembagaan dan kebijakan serta membandingkan ketentuan formal dengan informasi mengenai pelaksanaannya di tingkat tapak.

2.4 Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan serta interpretasi data. Tahap persiapan mencakup identifikasi permasalahan, penelaahan dokumen kebijakan, penentuan informan, dan penyusunan instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian disusun berdasarkan tujuan penelitian dan dimensi implementasi kebijakan yang digunakan sebagai kerangka analisis.

Tahap pengumpulan data mencakup pelaksanaan wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Informasi dari pengelola KPH dan masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, data diorganisasikan berdasarkan sumber informasi dan tema penelitian untuk mendukung proses pengodean, analisis, dan interpretasi hasil.

Tahap pengolahan dan interpretasi dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan dimensi penelitian, membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta menyusun uraian mengenai capaian implementasi, kendala kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat. Dalam penyajian hasil, identitas responden diperlakukan secara rahasia untuk menjaga kerahasiaan informasi individual.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif untuk mengidentifikasi pola, perbedaan informasi, dan keterkaitan antartema yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KPH dan partisipasi masyarakat.

Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Informasi yang relevan kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan visualisasi untuk memperjelas variasi capaian indikator serta hubungan konseptual antara ketentuan kebijakan, praktik kelembagaan, dan pengalaman masyarakat.

Data kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan variasi penilaian responden terhadap indikator penelitian. Hasil pengolahan disajikan sebagai skor indikator dan kategori penilaian pada aspek implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, faktor implementasi, serta efektivitas pengelolaan hutan. Perbandingan skor digunakan untuk mengidentifikasi capaian relatif antardimensi dan tidak ditafsirkan sebagai bukti hubungan sebab-akibat. Rata-rata aritmetika antarskor, apabila disajikan, diperlakukan sebagai ringkasan deskriptif dan bukan sebagai indeks komposit yang telah tervalidasi.

Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan temuan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen kelembagaan serta mengaitkannya dengan kerangka implementasi kebijakan Edward III. Penarikan kesimpulan diarahkan untuk menjelaskan capaian implementasi, kendala kelembagaan, ketidakseimbangan partisipasi masyarakat, dan kebutuhan penguatan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

2.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dikaji melalui pemeriksaan konsistensi informasi yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi lapangan, dan dokumen. Triangulasi sumber digunakan sebagai kerangka pemeriksaan untuk membandingkan informasi dari pengelola KPH, masyarakat, dan sumber kelembagaan lainnya. Sementara itu, triangulasi metode diarahkan pada perbandingan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda.

Pemeriksaan keabsahan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara informasi empiris, konteks kelembagaan, dan interpretasi hasil penelitian. Perbedaan informasi antarsumber dipertimbangkan sebagai bagian dari variasi pengalaman, kepentingan, dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan KPH. Kredibilitas interpretasi didasarkan pada konsistensi informasi yang dapat ditelusuri, keterkaitan temuan dengan kerangka analisis, serta pembatasan kesimpulan sesuai dengan cakupan data dan pendekatan penelitian yang digunakan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, menunjukkan variasi capaian pada lima parameter pengelolaan hutan, yaitu perencanaan, kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan penilaian indikator implementasi kebijakan, perencanaan hutan dan kelembagaan memperoleh skor relatif lebih tinggi dibandingkan tiga parameter lainnya. Pola tersebut mengindikasikan bahwa capaian pada aspek perencanaan dan kelembagaan belum sepenuhnya diimbangi oleh capaian yang setara pada aspek pemanfaatan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks implementasi kebijakan kehutanan, perbedaan tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi keterhubungan antara perangkat perencanaan, kapasitas kelembagaan, dan pelaksanaan fungsi pengelolaan hutan di tingkat tapak [2], [9]

Hasil penilaian terhadap kelima parameter disajikan pada Tabel 1. Perencanaan hutan memperoleh skor tertinggi sebesar 78 dan termasuk kategori tinggi. Sementara itu, kelembagaan memperoleh skor 72, pemanfaatan hutan 69, pengawasan 65, dan partisipasi masyarakat 60; keempatnya berada dalam kategori sedang. Rata-rata aritmetika kelima parameter mencapai 68,8, dengan selisih 18 poin antara skor tertinggi dan terendah. Rata-rata tersebut merupakan ringkasan deskriptif berdasarkan pembobotan yang sama untuk setiap parameter dan tidak ditafsirkan sebagai indeks efektivitas komposit yang telah divalidasi.

Tabel 1. Tingkat Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

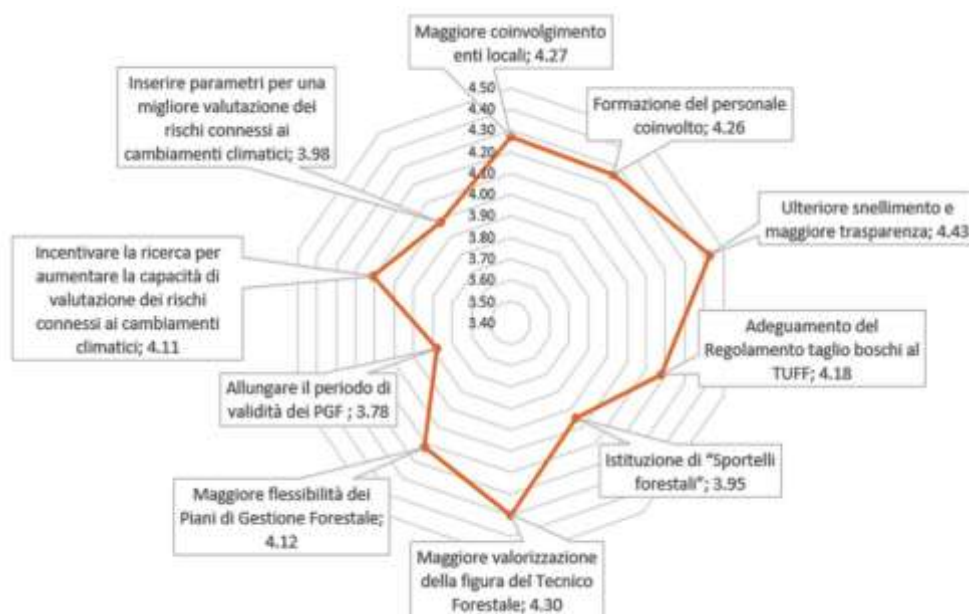
Parameter implementasi	Skor rata-rata	Kategori
Perencanaan hutan	78	Tinggi
Kelembagaan	72	Sedang
Pemanfaatan hutan	69	Sedang
Pengawasan	65	Sedang
Partisipasi masyarakat	60	Sedang

Sumber: Analisis data primer, 2025

Perencanaan hutan merupakan parameter dengan capaian tertinggi, yang menunjukkan bahwa aspek perencanaan relatif lebih berkembang dibandingkan parameter implementasi lainnya. Capaian tersebut dapat dikaitkan dengan keberadaan perangkat perencanaan pengelolaan hutan, termasuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), sepanjang keberadaan dan relevansi dokumen tersebut telah dikonfirmasi melalui telaah dokumen penelitian. Namun, capaian perencanaan yang relatif tinggi tidak secara langsung menunjukkan keberhasilan pelaksanaan seluruh program pengelolaan hutan. Implementasi kebijakan juga memerlukan dukungan sumber daya operasional, pembiayaan, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme pemantauan yang memadai [3], [10].

Pada aspek kelembagaan dan pemanfaatan hutan, skor masing-masing sebesar 72 dan 69 menunjukkan capaian yang lebih rendah dibandingkan perencanaan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan aspek perencanaan perlu disertai peningkatan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan hutan. Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Edward III, ketersediaan sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan dimensi penting dalam memahami pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kelembagaan tidak cukup didasarkan pada keberadaan struktur organisasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana operasional, serta koordinasi antarpemangku kepentingan [11], [12].

Distribusi skor kelima parameter divisualisasikan melalui diagram radar pada Gambar 1. Visualisasi tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan hutan memiliki capaian tertinggi, sedangkan pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan dua parameter dengan skor terendah. Pengawasan memperoleh skor 65, yang menunjukkan perlunya perhatian terhadap penguatan fungsi pemantauan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan. Sementara itu, partisipasi masyarakat memperoleh skor 60, lebih rendah dibandingkan seluruh parameter lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam penguatan implementasi kebijakan KPH. Namun, skor tersebut belum dapat menjelaskan bentuk, intensitas, maupun faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat tanpa analisis indikator yang lebih terperinci [13], [14].



Gambar 1. Distribusi Skor Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

Selisih 18 poin antara perencanaan hutan dan partisipasi masyarakat memperlihatkan ketidakseimbangan relatif antara capaian perencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Secara konseptual, pola tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi kesenjangan antara aspek perencanaan dan dimensi pelaksanaan kebijakan (*planning-implementation gap*). Interpretasi ini bersifat deskriptif dan tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kedua parameter. Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor yang mendasari perbedaan capaian tersebut memerlukan integrasi bukti wawancara, observasi, dan dokumen kelembagaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Buru memiliki capaian yang belum merata antardimensi, dengan perencanaan hutan sebagai parameter tertinggi dan partisipasi masyarakat sebagai parameter terendah. Temuan tersebut memberikan dasar bagi penguatan keterhubungan antara perencanaan, kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Implikasi praktisnya mencakup peningkatan kapasitas operasional, perbaikan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pengelolaan hutan. Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan KPH yang lebih terpadu, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi kelembagaan serta sosial masyarakat setempat [15], [16].

3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), khususnya dalam menghubungkan kepentingan kelembagaan dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Hasil penelitian pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat bervariasi menurut tahapan pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat relatif lebih tinggi pada pelaksanaan kegiatan dibandingkan pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Pola tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan operasional belum diimbangi oleh keterlibatan yang setara dalam proses penentuan arah pengelolaan hutan [14].

Berdasarkan hasil penilaian terhadap empat indikator partisipasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2, pelaksanaan kegiatan memperoleh skor tertinggi sebesar 68 dengan kategori sedang, diikuti pemantauan sebesar 60 yang juga termasuk kategori sedang. Sebaliknya, keterlibatan dalam perencanaan memperoleh skor 55 dan pengambilan keputusan sebesar 50, yang keduanya berada dalam kategori rendah. Rata-rata aritmetika keempat indikator mencapai 58,25, dengan selisih 18 poin antara skor tertinggi dan terendah. Nilai rata-rata tersebut merupakan ringkasan deskriptif tanpa pembobotan dan tidak ditafsirkan sebagai indeks partisipasi terstandar.

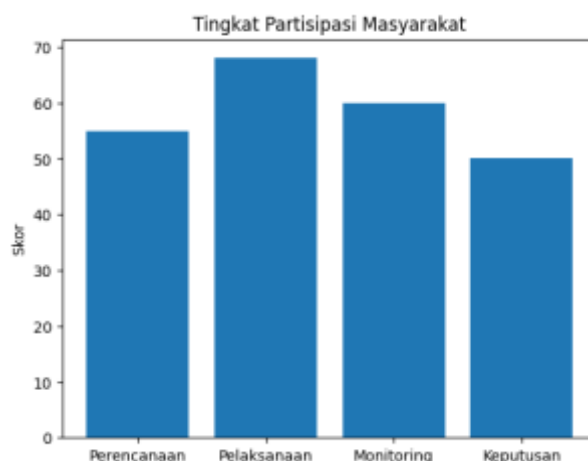
Tabel 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan pada KPHP Model Unit II Wae Apu

Indikator partisipasi	Skor	Kategori
Keterlibatan dalam perencanaan	55	Rendah
Pelaksanaan kegiatan	68	Sedang
Pemantauan	60	Sedang
Pengambilan keputusan	50	Rendah

Sumber: Analisis data primer, 2025.

Perbedaan skor antarindikator memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat relatif lebih berkembang pada tahap pelaksanaan dibandingkan pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selisih antara pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan mencapai 18 poin, sedangkan selisih antara pelaksanaan dan perencanaan sebesar 13 poin. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relatif dalam keterlibatan masyarakat pada berbagai tahapan pengelolaan hutan. Dalam perspektif tata kelola partisipatif, kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya memperluas ruang keterlibatan masyarakat, terutama dalam penyusunan prioritas kegiatan dan proses pengambilan keputusan [17].

Distribusi skor partisipasi masyarakat divisualisasikan pada Gambar 2. Diagram batang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan memiliki capaian tertinggi, sedangkan pengambilan keputusan merupakan indikator dengan capaian terendah. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tidak selalu mencerminkan tingkat pengaruh yang setara terhadap keputusan kelembagaan. Oleh karena itu, evaluasi partisipasi perlu mempertimbangkan tidak hanya kehadiran atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, tetapi juga kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam penentuan arah pengelolaan hutan.



Gambar 2. Distribusi Skor Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan pada KPHP Model Unit II Wae Apu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berkaitan dengan peluang memperoleh manfaat dari kegiatan pengelolaan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Meskipun demikian, temuan tersebut belum cukup untuk menetapkan manfaat ekonomi sebagai faktor dominan yang menentukan partisipasi masyarakat. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, keterlibatan masyarakat juga perlu dipahami melalui akses terhadap informasi, kesempatan menyampaikan aspirasi, serta hubungan kelembagaan antara pengelola KPH dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut merupakan aspek yang relevan untuk diperhatikan dalam pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih substantif [18], [19].

Pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang berkembang dalam masyarakat berpotensi mendukung pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi sosial-ekologis setempat. Namun, pemanfaatannya dalam kebijakan KPH memerlukan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan pengalaman dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Rendahnya skor perencanaan dan pengambilan keputusan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap akses masyarakat pada forum perencanaan, proses konsultasi, dan mekanisme penentuan prioritas pengelolaan. Penilaian mengenai tingkat kemitraan atau pengaruh aktual masyarakat terhadap keputusan kelembagaan tetap memerlukan bukti kualitatif yang lebih terperinci [20], [21].

Temuan ini sejalan dengan hasil analisis implementasi kebijakan pada Sub-bab 3.1, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan parameter dengan capaian relatif terendah. Namun, skor partisipasi pada Tabel 1 sebesar 60 dan rata-rata aritmetika indikator pada Tabel 2 sebesar 58,25 tidak dapat langsung diperlakukan sebagai ukuran yang identik tanpa penjelasan mengenai instrumen dan prosedur penghitungan masing-masing. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat perlu diprioritaskan pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, dengan tetap mempertahankan keterlibatan dalam pelaksanaan serta pemantauan. Strategi yang dapat dikembangkan mencakup peningkatan akses informasi, penguatan forum komunikasi, transparansi proses kelembagaan, dan penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berkontribusi terhadap penentuan prioritas pengelolaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola hutan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten [18].

3.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan KPH

Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, dianalisis berdasarkan empat dimensi dalam kerangka implementasi

kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Hasil penelitian memperlihatkan variasi skor antardimensi, yang mengindikasikan bahwa capaian pada aspek komunikasi, dukungan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi belum berkembang secara merata. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi dimensi yang memerlukan perhatian dalam penguatan implementasi kebijakan KPH [22], [23], [24].

Hasil penilaian terhadap keempat dimensi disajikan pada Tabel 3. Sikap pelaksana memperoleh skor tertinggi sebesar 70 dengan kategori sedang, diikuti komunikasi sebesar 62 dan struktur birokrasi sebesar 60, yang juga termasuk kategori sedang. Sementara itu, sumber daya memperoleh skor terendah sebesar 58 dengan kategori rendah. Rata-rata aritmetika keempat dimensi mencapai 62,5, dengan selisih 12 poin antara skor tertinggi dan terendah. Nilai rata-rata tersebut merupakan ringkasan deskriptif tanpa pembobotan dan tidak ditafsirkan sebagai indeks efektivitas kebijakan yang telah tervalidasi.

Tabel 3. Skor Dimensi Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

Dimensi implementasi	Skor	Kategori
Komunikasi	62	Sedang
Sumber daya	58	Rendah
Sikap pelaksana	70	Sedang
Struktur birokrasi	60	Sedang

Sumber: Analisis data primer, 2025.

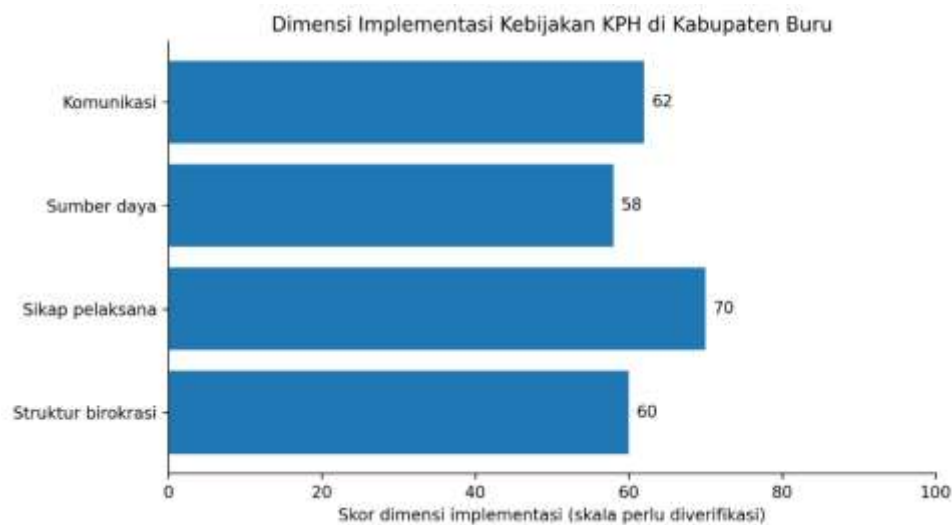
Sumber daya merupakan dimensi dengan capaian terendah dibandingkan tiga dimensi lainnya. Berdasarkan informasi kualitatif yang dilaporkan, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan dukungan anggaran, tenaga teknis kehutanan, serta sarana dan prasarana operasional. Dalam pelaksanaan kebijakan KPH, ketersediaan sumber daya diperlukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan, perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kelembagaan di tingkat tapak. Oleh karena itu, skor sumber daya yang relatif rendah menunjukkan perlunya perhatian terhadap kecukupan kapasitas operasional. Meskipun demikian, kontribusi masing-masing keterbatasan terhadap capaian implementasi belum dapat ditentukan berdasarkan skor agregat tanpa dukungan analisis indikator yang lebih terperinci [18], [25].

Sikap pelaksana memperoleh skor tertinggi sebesar 70, meskipun masih berada dalam kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi disposisi pelaksana memiliki capaian relatif lebih baik dibandingkan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam kerangka Edward III, disposisi mencakup orientasi, penerimaan, dan kecenderungan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Namun, capaian tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh pelaksana memiliki komitmen tinggi. Penilaian mengenai disposisi perlu mempertimbangkan indikator pengukuran serta informasi kualitatif mengenai pemahaman, sikap, dan pengalaman pelaksana kebijakan.

Dimensi komunikasi dan struktur birokrasi masing-masing memperoleh skor 62 dan 60. Kedua dimensi tersebut berada dalam kategori sedang dan menunjukkan perlunya perhatian terhadap mekanisme penyampaian informasi, koordinasi antarpemangku kepentingan, pembagian tugas, dan pelaksanaan prosedur kelembagaan. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang jelas diperlukan agar tujuan dan ketentuan kebijakan dapat dipahami secara konsisten oleh

pelaksana dan pihak terkait. Sementara itu, struktur birokrasi berperan dalam mendukung pembagian kewenangan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan kedua dimensi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kejelasan komunikasi dan efektivitas koordinasi kelembagaan, sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan operasional KPH [10], [26] .

Distribusi skor keempat dimensi implementasi kebijakan divisualisasikan pada Gambar 3. Diagram batang memperlihatkan bahwa sikap pelaksana memiliki skor tertinggi, sedangkan sumber daya merupakan dimensi dengan skor terendah. Selisih sebesar 12 poin antara kedua dimensi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan relatif antara capaian disposisi pelaksana dan dukungan sumber daya. Secara konseptual, pola ini relevan untuk menjelaskan bahwa orientasi pelaksana terhadap kebijakan perlu didukung oleh kapasitas operasional yang memadai. Namun, perbedaan skor tersebut merupakan temuan deskriptif dan tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antardimensi implementasi.



Gambar 3. Distribusi Skor Dimensi Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

Temuan pada Tabel 3 memiliki keterkaitan konseptual dengan hasil analisis implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat pada Sub-bab 3.1 dan 3.2. Rendahnya skor sumber daya relevan untuk ditelaah bersama dengan capaian pengawasan yang relatif lebih rendah dibandingkan perencanaan hutan. Demikian pula, dimensi komunikasi dan struktur birokrasi perlu dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, kesesuaian pola antardimensi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti hubungan kausal karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif [27], [28].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan KPH perlu mempertimbangkan keterpaduan antara dukungan sumber daya, komunikasi kebijakan, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan capaian relatif antardimensi, penguatan sumber daya operasional menjadi salah satu prioritas yang perlu dipertimbangkan, disertai peningkatan kompetensi tenaga teknis, penyediaan sarana pendukung, perbaikan komunikasi kebijakan, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Upaya tersebut perlu diintegrasikan dengan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat agar pelaksanaan kebijakan KPH lebih responsif terhadap kebutuhan pengelolaan hutan dan kondisi sosial kelembagaan di Kabupaten Buru.

3.4 Efektivitas Implementasi Kebijakan KPH

Efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, dikaji melalui empat dimensi penilaian, yaitu kelembagaan, ekologi, sosial, dan ekonomi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menggambarkan capaian relatif implementasi kebijakan dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi memperoleh skor dalam kategori sedang, dengan variasi yang mencerminkan perbedaan capaian antarbidang pengelolaan. Pola tersebut mengindikasikan perlunya penguatan implementasi kebijakan secara terpadu, terutama dalam menghubungkan kapasitas kelembagaan dengan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi pengelolaan hutan di tingkat tapak [24], [29].

Hasil penilaian terhadap keempat dimensi disajikan pada Tabel 4. Kelembagaan memperoleh skor tertinggi sebesar 70, diikuti ekonomi sebesar 68, ekologi sebesar 65, dan sosial sebesar 60. Seluruh dimensi termasuk kategori sedang berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam penelitian. Rata-rata aritmetika keempat skor mencapai 65,75, dengan selisih 10 poin antara skor tertinggi dan terendah. Nilai rata-rata tersebut merupakan ringkasan deskriptif dengan pembobotan yang sama untuk setiap dimensi dan tidak ditafsirkan sebagai indeks efektivitas komposit yang telah tervalidasi.

Tabel 4. Skor Dimensi Efektivitas Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

Dimensi efektivitas	Skor	Kategori
Kelembagaan	70	Sedang
Ekologi	65	Sedang
Sosial	60	Sedang
Ekonomi	68	Sedang

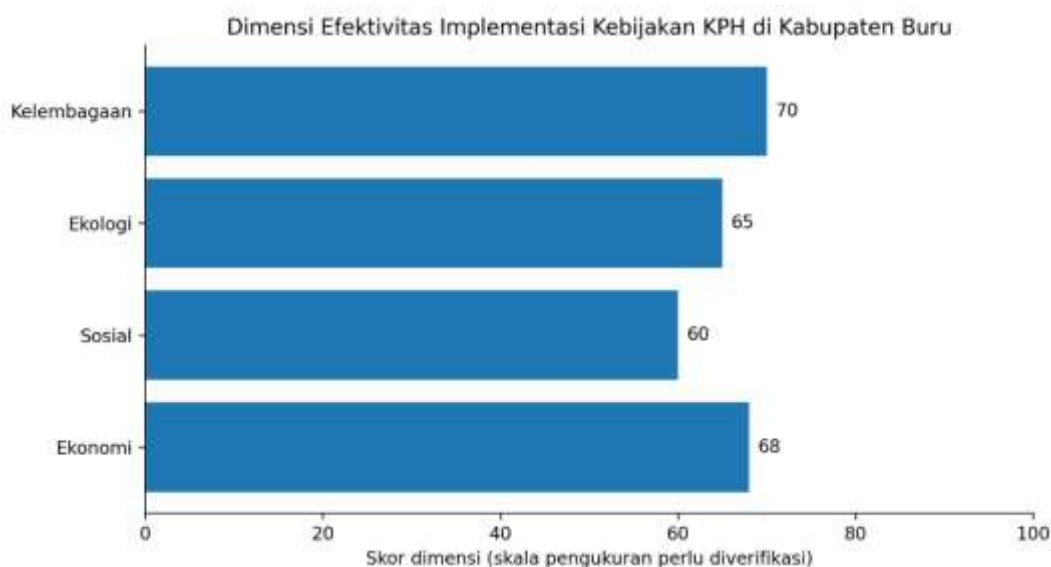
Sumber: Analisis data primer, 2025

Dimensi kelembagaan memperoleh skor tertinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian penilaian kelembagaan relatif lebih baik dibandingkan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam konteks implementasi kebijakan KPH, dimensi kelembagaan berkaitan dengan kapasitas organisasi dalam mendukung perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi pengelolaan hutan. Namun, skor sebesar 70 yang masih berada dalam kategori sedang belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kelembagaan telah berfungsi secara optimal. Penilaian yang lebih komprehensif memerlukan bukti mengenai realisasi program, kemampuan koordinasi, kecukupan dukungan operasional, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak [30], [31].

Dimensi ekonomi memperoleh skor 68, sedangkan dimensi ekologi mencapai 65, dengan selisih tiga poin. Kedua dimensi tersebut memperlihatkan capaian penilaian yang relatif berdekatan. Secara konseptual, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan dan peluang manfaat ekonomi bagi masyarakat, sedangkan dimensi ekologi berkaitan dengan pemeliharaan fungsi serta kondisi ekosistem hutan. Meskipun demikian, skor yang diperoleh belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan kondisi tutupan hutan, atau pemulihan fungsi ekologis secara langsung. Interpretasi kedua dimensi dibatasi pada hasil penilaian berdasarkan instrumen penelitian, sedangkan evaluasi perubahan kondisi ekonomi dan ekologis memerlukan indikator hasil yang terukur serta data pembanding yang memadai [15], [32].

Dimensi sosial memperoleh skor terendah sebesar 60, meskipun masih termasuk kategori sedang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek sosial merupakan dimensi dengan capaian relatif paling rendah dalam penilaian efektivitas implementasi kebijakan KPH. Secara deskriptif, pola ini berkaitan dengan hasil Sub-bab 3.2 yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan memperoleh skor lebih rendah dibandingkan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, skor dimensi sosial pada Tabel 4 tidak dapat langsung disamakan dengan skor partisipasi masyarakat karena keduanya dapat merepresentasikan konstruk dan indikator pengukuran yang berbeda. Oleh karena itu, keterkaitan kedua temuan perlu dipahami sebagai kesesuaian pola deskriptif, bukan sebagai bukti hubungan kausal. [33].

Distribusi skor keempat dimensi efektivitas implementasi kebijakan disajikan pada Gambar 4. Diagram batang memperlihatkan bahwa kelembagaan memiliki capaian relatif tertinggi, sedangkan sosial merupakan dimensi dengan skor terendah. Selisih sebesar 10 poin antara kedua dimensi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan relatif dalam capaian penilaian. Perbedaan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan seluruh dimensi secara proporsional dalam mengevaluasi implementasi kebijakan KPH, karena capaian kelembagaan yang relatif lebih tinggi belum tentu diikuti oleh capaian sosial, ekonomi, dan ekologi yang setara.



Gambar 4. Distribusi Skor Dimensi Efektivitas Implementasi Kebijakan KPH di Kabupaten Buru

Dalam perspektif pengelolaan hutan berkelanjutan, efektivitas implementasi kebijakan perlu dipahami melalui keterkaitan antara kapasitas kelembagaan, keterlibatan masyarakat, perlindungan fungsi ekologis, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan koordinasi pengelolaan, sedangkan aspek sosial berkaitan dengan keterlibatan serta kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan. Pada saat yang sama, dimensi ekonomi dan ekologi perlu diperhatikan agar pemanfaatan sumber daya hutan tidak mengabaikan keberlanjutan fungsi ekosistem. Dengan demikian, hasil penilaian pada satu dimensi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan implementasi kebijakan.

Temuan pada Sub-bab 3.1–3.3 memberikan konteks tambahan terhadap variasi skor efektivitas. Capaian perencanaan hutan yang relatif tinggi, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan skor sumber daya yang lebih rendah dibandingkan dimensi implementasi lainnya menunjukkan adanya kebutuhan penguatan pada beberapa aspek pengelolaan. Keterkaitan antartemuan tersebut mendukung pentingnya pendekatan implementasi kebijakan yang

terintegrasi. Meskipun demikian, hubungan antara dimensi implementasi dan capaian efektivitas belum dapat ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat karena penelitian ini tidak secara khusus menguji pengaruh antardimensi.

Secara keseluruhan, penilaian efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Buru menunjukkan bahwa seluruh dimensi berada dalam kategori sedang, dengan kelembagaan sebagai dimensi tertinggi dan sosial sebagai dimensi terendah. Berdasarkan pola tersebut, prioritas penguatan dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas operasional kelembagaan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, penguatan pengelolaan berbasis ekosistem, serta pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan yang memperhatikan keberlanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial-ekologis setempat.

3.5 Sintesis Pembahasan

Sintesis hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, ditandai oleh ketidakseimbangan relatif antara capaian perencanaan, dukungan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan dimensi efektivitas pengelolaan hutan. Perencanaan hutan memperoleh skor tertinggi sebesar 78, sedangkan pengawasan dan partisipasi masyarakat masing-masing mencapai 65 dan 60. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa capaian pada aspek perencanaan belum diimbangi oleh capaian yang setara pada seluruh dimensi pelaksanaan kebijakan di tingkat tapak. Secara konseptual, pola ini dapat dipahami sebagai indikasi kesenjangan antara penguatan perangkat formal dan praktik implementasi (*planning-implementation gap*). Namun, temuan tersebut belum cukup untuk membuktikan terjadinya *institutional decoupling*, karena hubungan antara struktur formal, praktik organisasi, dan realisasi program belum diuji secara khusus dalam penelitian ini [13].

Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Edward III, variasi capaian pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memperlihatkan adanya kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan secara terpadu. Sikap pelaksana memperoleh skor tertinggi sebesar 70, sedangkan sumber daya mencapai skor terendah sebesar 58. Selisih 12 poin tersebut menunjukkan bahwa capaian relatif pada dimensi disposisi pelaksana belum diimbangi oleh dukungan sumber daya yang setara. Dalam konteks pengelolaan hutan di tingkat tapak, temuan ini menempatkan kecukupan tenaga teknis, pembiayaan, sarana operasional, dan koordinasi kelembagaan sebagai aspek yang relevan untuk diperhatikan. Meskipun demikian, rendahnya skor sumber daya tidak secara langsung membuktikan bahwa dimensi tersebut merupakan penyebab utama keterbatasan implementasi. Penilaian mengenai kontribusi masing-masing faktor memerlukan bukti operasional dan analisis hubungan antardimensi yang lebih terperinci [7], [34].

Ketidakseimbangan serupa ditemukan pada partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan memperoleh skor tertinggi sebesar 68, sedangkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masing-masing mencapai 55 dan 50. Pola ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat relatif lebih berkembang pada tahap pelaksanaan dibandingkan pada tahap penentuan arah pengelolaan hutan. Secara deskriptif, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan partisipasi (*participation asymmetry*) antartahapan pengelolaan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi tata kelola kolaboratif, karena keterlibatan dalam kegiatan operasional tidak selalu mencerminkan kesempatan yang setara untuk memengaruhi keputusan kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi perlu diarahkan pada peningkatan akses informasi, keterbukaan proses perencanaan, penguatan forum komunikasi, dan penyediaan mekanisme yang memungkinkan aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam penentuan prioritas

pengelolaan. Namun, tingkat pengaruh aktual masyarakat terhadap keputusan KPH belum dapat ditetapkan tanpa bukti mengenai proses pengambilan keputusan dan pembagian kewenangan [35], [36]

Penilaian efektivitas implementasi kebijakan memperlihatkan bahwa kelembagaan memperoleh skor tertinggi sebesar 70, diikuti ekonomi sebesar 68, ekologi sebesar 65, dan sosial sebesar 60. Seluruh dimensi berada dalam kategori sedang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa capaian penilaian kelembagaan relatif lebih tinggi dibandingkan dimensi lainnya, terutama dimensi sosial. Secara konseptual, pola ini menegaskan pentingnya evaluasi multidimensi dalam pengelolaan hutan, karena capaian kelembagaan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam perspektif sistem sosial-ekologis (social-ecological systems), pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara kapasitas institusi, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan sumber daya, dan pemeliharaan fungsi ekosistem. Namun, skor penilaian yang tersedia belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya perbaikan kondisi ekologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau penguatan resiliensi sistem tanpa indikator hasil yang terukur.

Integrasi temuan pada Sub-bab 3.1–3.4 mengidentifikasi tiga prioritas penguatan implementasi kebijakan KPH. Pertama, perbedaan capaian antara perencanaan, pengawasan, dan partisipasi menunjukkan pentingnya memperkuat keterhubungan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan fungsi pengelolaan di tingkat tapak. Kedua, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menunjukkan perlunya pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih substantif. Ketiga, rendahnya capaian dimensi sumber daya dibandingkan dimensi implementasi lainnya menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas operasional kelembagaan. Ketiga prioritas tersebut saling berkaitan secara konseptual, tetapi hubungan sebab-akibat di antaranya belum dapat ditentukan berdasarkan pendekatan deskriptif yang digunakan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyajian bukti deskriptif yang mengintegrasikan capaian implementasi kebijakan, dimensi Edward III, partisipasi masyarakat, dan penilaian efektivitas pengelolaan hutan dalam satu konteks kelembagaan, yaitu KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan kehutanan perlu mempertimbangkan perbedaan capaian antara aspek administratif, kapasitas operasional, keterlibatan masyarakat, dan dimensi pengelolaan hutan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar untuk memprioritaskan peningkatan kompetensi tenaga teknis, penyediaan sarana operasional, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta perluasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Strategi tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan tata kelola adaptif yang menekankan pembelajaran kelembagaan, koordinasi lintasaktor, dan penyesuaian pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, penguatan implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Buru perlu diarahkan pada keterpaduan kapasitas kelembagaan, kualitas partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. [19], [29].

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada KPHP Model Unit II Wae Apu, Kabupaten Buru, memiliki capaian yang belum merata antardimensi pengelolaan. Perencanaan hutan memperoleh skor tertinggi (78), sedangkan pengawasan (65) dan partisipasi masyarakat (60) menunjukkan capaian lebih rendah, mengindikasikan ketidakseimbangan relatif antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat lebih berkembang pada pelaksanaan kegiatan (68) dibandingkan

perencanaan (55) dan pengambilan keputusan (50), sehingga diperlukan perluasan keterlibatan dalam penentuan prioritas pengelolaan. Berdasarkan kerangka Edward III, sumber daya memperoleh skor terendah (58), sedangkan sikap pelaksana tertinggi (70), menunjukkan ketidakseimbangan antara dukungan operasional dan disposisi pelaksana. Penilaian efektivitas menghasilkan skor kelembagaan 70, ekologi 65, sosial 60, dan ekonomi 68, yang seluruhnya termasuk kategori sedang. Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada sintesis deskriptif mengenai perbedaan capaian perencanaan, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan efektivitas implementasi kebijakan KPH. Implikasi praktisnya mencakup peningkatan kompetensi tenaga teknis, penyediaan sarana operasional, penguatan koordinasi kelembagaan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Strategi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekologis setempat untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih terpadu dan inklusif. Mengingat pendekatan penelitian bersifat deskriptif, perbedaan skor tidak membuktikan hubungan sebab-akibat maupun perubahan langsung pada kondisi ekologis dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji keterkaitan antardimensi menggunakan indikator kinerja dan hasil sosial-ekologis terukur, disertai pemantauan berkala guna memperkuat evaluasi implementasi kebijakan kehutanan di tingkat tapak dan menyediakan dasar empiris bagi penyusunan strategi pengelolaan yang adaptif, akuntabel, serta berkelanjutan dalam konteks wilayah kepulauan.

Daftar Pustaka

- [1] W. Andayani, "Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Unit Usaha Mandiri Berbasis Ekosistem untuk Kesejahteraan Masyarakat sekitar Hutan," *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Agro*, 2021.
- [2] I. S. Ruhimat, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar (Implementation Effectiness of Forest Management Unit Policy in Banjar District)," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 7, no. 3, 2010.
- [3] W. Fitria, D. Suharjito, and S. Ekawati, "Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 18, no. 2, 2021, doi: 10.20886/jakk.2021.18.2.145-160.
- [4] R. Qurniati, A. M. Putra, and . D., "Implementasi Agroforestri Dan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Lahan Di KPH Batutegei Provinsi Lampung," *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, vol. 8, no. 2, 2024, doi: 10.32522/ujht.v8i2.13164.
- [5] M. H. Al Fajar and C. Sa'roni, "Analisis Kelayakan Klusterisasi Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 5, no. 1, 2022, doi: 10.20527/jiep.v5i1.5533.
- [6] I. Yeny and H. Dwiprabowo, "Analisis Tujuan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 11, no. 1, 2014, doi: 10.20886/jakk.2014.11.1.25-39.
- [7] L. N. Ajjiah, R. Safe'i, and S. B. Yuwono, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Hkm Harapan Sentosa KPH Batutegei," *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, vol. 6, no. 2, 2022, doi: 10.32522/ujht.v6i2.8073.
- [8] M. Marwoto, A. Ahyauddin, and A. S. Putri, "Analisis kebutuhan lokal (Need Assessment) KPHP Bungo II dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak," *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, vol. 8, no. 2, 2024, doi: 10.32522/ujht.v8i2.15522.
- [9] I. S. Ruhimat, "Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 7, no. 3, 2010.

- [10] E. Yosefi Suryandari and S. Sylviani, "Kajian Implementasi Kebijakan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Daerah (Studi Kasus KPH Banjar, Kalimantan Selatan Dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan)," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 9, no. 2, 2012, doi: 10.20886/jakk.2012.9.2.114-130.
- [11] K. Budiningsih, S. Ekawati, G. Gamin, S. Sylviani, Elvida. Yosefi. Suryandari, and F. Salaka, "Tipologi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Indonesia," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 12, no. 3, 2015, doi: 10.20886/jakk.2015.12.3.283-298.
- [12] S. S. Husen, S. Supratman, and R. Ridwan, "Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, vol. 10, no. 2, 2018, doi: 10.24259/jhm.v10i2.4941.
- [13] A. Rizal HB, I. Novita Dewi, and P. Kusumedi, "Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 8, no. 2, 2011, doi: 10.20886/jakk.2011.8.2.167-188.
- [14] A. Mahyuddin, S. B. Yuwono, S. Bakri, I. G. Febryanto, C. Wulandari, and H. Kaskoyo, "Pengaruh Faktor Aksesibilitas Wilayah Dan Program Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Terhadap Tingkat Ketertarikan Masyarakat Pada Pengelolaan Bisnis Minyak Atsiri Di KPH Pesawaran," *Jurnal Hutan Tropis*, vol. 12, no. 2, 2024, doi: 10.20527/jht.v12i2.19753.
- [15] S. Sylviani and I. Hakim, "Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 11, no. 4, 2014, doi: 10.20886/jsek.2014.11.4.309-322.
- [16] M. I. D. Moyo, Golar, and Rukmi, "Potensi Sosial Budaya Masyarakat Bagi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pada Wilayah KPH Model Sintuwu Maroso Di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir," *Warta Rimba*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [17] M. H. Daulay, F. D. Susanti, D. Laraswati, E. C. Arthalina, and A. Maryudi, "New land governance models and management scenarios: Fitting Forest Management Units (FMUs) for forested landscapes outside forest zones in Indonesia," *Forest and Society*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.24259/fs.v7i1.23962.
- [18] A. S. Ekawati Syam, N. Nuraeni, and I. Hasan, "Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Menuju Kemandirian UPT (Unit Pelaksana Teknis) (Studi Kasus UPT-KPH Jeneberang II Meliputi Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai)," *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.33096/agrotek.v7i1.292.
- [19] R. Haulussy, B. Latuamury, and I. Iskar, "Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air DAS Wae Batu Merah Kota Ambon," *MAKILA*, vol. 18, no. 1, 2024, doi: 10.30598/makila.v18i1.10561.
- [20] B. Latuamury, H. Marasabessy, and M. H. Hadidjah, "Menakar Kesiapsiagaan Masyarakat Pemukim Di Sempadan Sungai Das Wae Batu Merah Kota Ambon Dalam Menghadapi Banjir," *Prosiding seminar perhutanan sosial, fakultas pertanian Universitas Pattimura*, 2019.
- [21] H. Gunawan *et al.*, "Empowering conservation: the transformative role of mangrove education in Indonesia's climate strategies," 2025. doi: 10.1080/21580103.2025.2519475.
- [22] B. Daoa, R. Loppies, and B. Latuamury, "Studi Empiris Pengelolaan Hutan Kota Berkelanjutan Di Taman Makmur Siwalima Kota Ambon," *Jurnal Geografi, Lingkungan dan Kesehatan*, vol. 1, no. 2, 2023, doi: 10.30598/jglk.1.2.12021.
- [23] J. S. Siahaya, B. Latuamury, and R. Loppies, "Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Lanskap Hutan DAS Wae Batu Merah Kota Ambon," *Jurnal Nusa Sylva*, vol. 24, no. 2, 2025, doi: 10.31938/jns.v24i2.760.
- [24] M. Rodd *et al.*, "Coordinating forest tenure reform: Objectives, resources and relations in Indonesia, Kenya, Nepal, Peru, and Uganda," *For. Policy Econ.*, vol. 139, 2022, doi: 10.1016/j.forpol.2022.102718.

- [25] H. Khatomy, M. H. Idris, and I. M. L. Aji, "Komposisi, struktur dan keanekaragaman vegetasi di kawasan rehabilitasi RPH Jerowaru KPH Rinjani Timur," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, 2023.
- [26] I. F. Suri, F. Naviza, A. T. Permana, S. Bakri, R. Hilmanto, and I. S. Banuwa, "Peningkatan Persepsi Petani Hutan Kemasyarakatan dalam Pemilihan Jenis Pohon Produktif pada Kelompok Gapoktan Wana Tani Lestari di KPH Batutege, Tanggamus," *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, vol. 3, no. 2, 2024.
- [27] R. Rimbawan, H. Hafizianor, and E. D. Pujawati, "Pengelolaan Agroforestri Pinus - Kopi Dan Kontribusinya Bagi Masyarakat Desa Babadan Pada Kawasan Hutan Pinus Perhutani KPH Malang Jawa Timur," *Jurnal Sylva Scienteeae*, vol. 4, no. 4, 2021, doi: 10.20527/jss.v4i4.3933.
- [28] P. Kusumedi, "Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros Di Propinsi Sulawesi Selatan (Policy and Stakeholder Analysis in Establishing Maros Model of Forest Management Unit in South Sulawesi)," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. Vol. 7 No., 2010.
- [29] N. Latupono, B. Latuamury, and W. N. Imlabla, "Bentuk Pemanfaatan Air Berbasis Tradisi Lokal, Studi Etnohidrologi Di Negeri Hukurila, Kota Ambon," *MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 3, no. 4, 2026, doi: 10.69840/marsegu/3.4.2026.339-352.
- [30] B. Latuamury, H. Marasabessy, M. Talaohu, and W. Imlabla, "Small island watershed morphometric and hydrological characteristics in Ambon Region, Maluku Province," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021. doi: 10.1088/1755-1315/800/1/012047.
- [31] I. Yeny, Murniati, and S. Suharti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Agroforestri di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 17, no. 1, 2020.
- [32] B. Latuamury, H. S. E. Aponno, and M. H. Hadijah, "Kajian Keberlanjutan Aliran Dasar Sungai Melalui Analisis Kurva Resesi Hidrograf Pada DAS Keduang Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, vol. 1, no. 3, 2017, doi: 10.30598/jhpk.2017.1.3.222.
- [33] Hastuti, Mappamiring, and Abdi, "Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [34] M. Makahity, J. Putuhena, and B. Latuamury, "Analisis Struktur Ekologi Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Halong, Pulau Ambon," *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, vol. 10, no. 2, 2026, doi: 10.32522/ujht.v10i2.25183.
- [35] B. Latuamury, J. D. Putuhena, and B. B. Sahupala, "Dissemination of the Agroecological Model of Alang-Alang Land Reclamation to Increase Land Productivity," *Jurnal Abdimas*, vol. 27, no. 2, 2023, doi: 10.15294/abdimas.v27i2.48320.